



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara maju, pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Berikut ini adalah tabel ringkasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006-2012.

Tabel 1.1
Tabel Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun 2006-2012

RINGKASAN APBN, 2006-2012
(miliar rupiah)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	RAPBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	637.987,2	707.806,2	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.169.914,6	1.292.877,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	636.153,1	706.108,3	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.165.252,5	1.292.052,6
1. Penerimaan Perpajakan	409.203,0	490.088,6	658.700,8	619.922,2	723.306,6	878.685,2	1.019.332,4
a. Pajak Dalam Negeri	395.971,5	470.051,8	622.358,7	601.251,8	694.392,1	831.745,3	976.898,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	13.231,5	20.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	46.939,9	42.433,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	286.567,3	272.720,2
II. Hibah	1.834,1	1.697,8	2.304,0	1.666,6	3.023,0	4.662,1	825,1
B. Belanja Negara	667.128,7	757.649,9	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.320.751,3	1.418.497,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	440.032,0	504.623,3	693.355,9	628.812,4	697.406,4	908.243,4	954.136,8
1. K/L	216.094,7	225.014,2	262.003,3	306.999,5	332.920,2	461.508,0	476.610,2
2. Non K/L	223.937,3	279.609,1	431.352,7	321.812,9	364.486,2	446.735,4	477.526,7
II. Transfer Ke Daerah	226.179,9	253.263,2	292.433,5	308.585,2	344.727,6	412.507,9	464.360,9
1. Dana Perimbangan	222.130,6	243.967,2	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.538,6	394.138,6
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	4.049,3	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,2	64.969,3	70.222,3
III. Suspen	916,8	(236,5)	(58,7)	(15,6)	(16,8)	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	49.941,1	29.962,7	84.308,5	5.163,2	41.537,5	(44.252,9)	(2.548,1)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(29.141,5)	(49.843,7)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(150.836,7)	(125.620,0)
% terhadap PDB	(0,9)	(1,3)	(0,1)	(1,6)	(0,7)	(2,1)	(1,5)
E. Pembiayaan	29.415,6	42.456,5	84.071,7	112.583,2	91.552,0	150.836,7	125.620,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	55.982,1	69.032,3	102.477,6	128.133,0	96.118,5	153.613,3	125.912,3
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(26.566,5)	(26.575,8)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(2.776,6)	(292,3)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	274,1	(7.387,1)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	0,0	0,0

Sumber: *Data Pokok APBN 2012*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan terus meningkat. Pajak yang dibayarkan akan

kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Misalnya perbaikan jalan yang rusak dan pembangunan jalan tol, penyelenggaraan pendidikan nasional, pemeliharaan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana alam, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah.

Upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini bukan tanpa suatu kendala. Kendala utama dalam rangka penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, 2014: 250). Praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian karena biasanya nilai aset perusahaan sangat besar, sehingga untuk menyeragamkan nilai aset dengan variabel lainnya sampel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perlu diubah dalam bentuk logaritma. Surbakti dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014: 251) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan

terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina dalam I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, 2014: 147).

Dalam mengaudit laporan keuangan, auditor harus bersikap independen agar menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas. Kecurangan klien tidak lepas dari rendahnya sikap independensi auditor. Dengan demikian kualitas audit adalah produk dari kompetensi dan independensi (Gull *et. al* dalam Eka Yuliyanto, 2014: 5). Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur dengan menggunakan hasil (*output*) berupa opini auditor. Hasil (*output*) audit penting bagi kualitas audit karena seringkali digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam menilai kualitas audit (Chadegani dalam Eka Yuliyanto, 2014: 5).

Sebagai contoh, laporan auditor kemungkinan akan dipandang positif mempengaruhi kualitas audit jika menyampaikan hasil audit dengan jelas. Annisa dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014: 252) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan

judul:

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kebijakan dalam menentukan pembiayaan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalah mengenai:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2014.
2. Penelitian menggunakan laporan keuangan *audited*, tahun buku berakhir pada 31 Desember, dan tidak *delisting* selama periode 2012 sampai dengan 2014.
3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah.
4. Variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, kualitas audit, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

”Faktor-faktor apa yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah maka tujuan dari pembuatan skripsi adalah untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.



3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi perusahaan

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi auditor

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penghindaran pajak sehingga pemerintah dapat mempeketat penerimaan negara dari sektor pajak.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam melakukan investasi pada perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.